

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pedagang Kaki Lima (PKL)

##### 2.1.1 Pengertian Pedagang Kaki Lima

Istilah kaki lima berasal dari trotoar yang dahulu berukuran lebar 5 *feet* atau sekitar 1,5 meter, sehingga dalam pengertian ini PKL merupakan pedagang yang berjualan pada kaki lima, dan biasanya mengambil tempat atau lokasi di daerah keramaian umum seperti trotoar di depan pertokoan/ kawasan perdagangan, pasar, sekolah, dan gedung bioskop (Widodo, 2000).

Mc. Gee dan Yeung (dalam Budi, 2006) mendefinisikan PKL yang memiliki pengertian yang sama dengan *hawkers*, sebagai orang-orang yang menawarkan barang dan jasa untuk dijual di tempat umum, terutama di pinggir jalan dan trotoar. Selanjutnya dalam perkembangannya, pedagang kaki lima tidak hanya mereka yang berjualan di atas trotoar saja, tetapi mereka yang berjualan disetiap jalur pejalan kaki, tempat-tempat parkir, ruang-ruang terbuka, taman-taman, terminal bahkan di persimpangan jalan dan berkeliling ke rumah-rumah penduduk (Widodo, 2000).

Dari pengertian tersebut, pedagang kaki lima adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa. Kegiatan yang dilakukan cenderung berpindah-pindah dengan kemampuan modal yang kecil/ terbatas, dan menggunakan peralatan sederhana dalam melakukan kegiatan jual-beli. Usaha tersebut biasanya berlokasi di tempat-tempat umum (terutama di atas trotoar atau sebagian badan jalan) dan tidak memiliki legalitas formal.

##### 2.1.2 Karakteristik Pedagang Kaki Lima

###### A. Berdasarkan Jenis Dagangan

Untuk jenis dagangan yang ditawarkan/ dijual oleh pedagang kaki lima dapat dikelompokkan menjadi (Mc. Gee and Yeung, dalam Budi, 2006):

1. Bahan makanan mentah dan makanan setengah jadi, seperti bahan mentah makanan (daging, buah, dan sayuran). Selain itu juga dapat berupa barang-barang setengah jadi seperti beras.

2. Makanan siap saji, jenis dagangan ini berupa makanan dan minuman yang telah dimasak dan langsung disajikan ditempat maupun dibawa pulang.
3. Non makanan, berupa dagangan yang tidak berupa makanan/ minuman misalnya barang tekstil sampai dengan obat-obatan.
4. Jasa pelayanan (*service*), jenis dagangan yang diperjual belikan adalah jasa perorangan seperti tukang membuat kunci, reparasi jam, dan lain sebagainya.

#### **B. Berdasarkan Alat/ Sarana yang Digunakan**

Ditinjau dari alat/ sarana jual yang dipergunakan, kegiatan pedagang kaki lima dapat dibagi menjadi 5 (lima) menurut Waworoentoe (dalam Widjajanti, 2000: 39-40), yaitu:

1. Hampan di lantai  
Merupakan kelompok kegiatan pedagang kaki lima yang menggunakan alat jual seperti tikar, kain, plastik, meja dalam bentuk sederhana, bakul atau yang sejenis sebagai alas untuk menjajalan barang dagangan. Jika dikaitkan dengan cara melakukan kegiatannya, PKL kelompok ini dikategorikan sebagai kelompok aktivitas semi permanen.
2. Pikulan/ keranjang  
Merupakan kelompok kegiatan pedagang kaki lima yang menggunakan satu atau dua keranjang dengan cara dipikul. Kelompok kegiatan dengan sarana jual pikulan merupakan suatu bentuk aktivitas perdagangan yang menunjukkan ciri tradisional. Jika dikaitkan dengan cara melakukan kegiatannya, PKL kelompok ini dikategorikan sebagai kelompok aktivitas non permanen atau semi permanen.
3. Meja/ songko  
Merupakan kegiatan pedagang kaki lima yang menggunakan meja/ songko sebagai sarana menjajakan barang yang diperdagangkan. Kelompok kegiatan dengan meja ada yang diberi pelengkap atap dan ada yang tidak. Tujuannya untuk melindungi barang maupun pedagang dari cuaca panas, hujan ataupun gangguan debu. Jika dikaitkan dengan cara melakukan kegiatannya, PKL kelompok ini dikategorikan sebagai kelompok aktivitas permanen.
4. Kereta dorong  
Merupakan kelompok kegiatan pedagang kaki lima yang menggunakan sebuah kereta dorong sebagai sarana berdagang. Alat ini ada yang dilengkapi atap, dan ada yang diberi tenda. Penggunaan alat kereta dorong banyak

dipakai karena kemudahannya mengangkut barang dagangan. Jika dikaitkan dengan cara melakukan kegiatannya, PKL kelompok ini dikategorikan sebagai kelompok aktivitas permanen.

#### 5. Kios

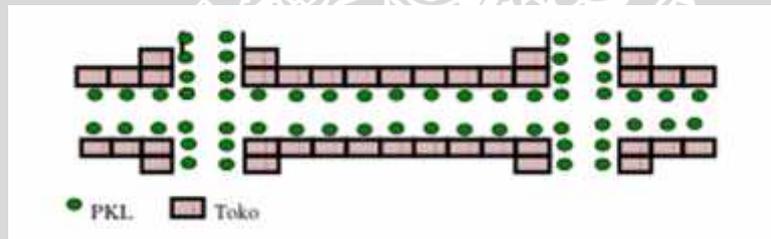
Merupakan kelompok kegiatan pedagang kaki lima yang menggunakan kios sebagai sarana penjualannya. Jika dikaitkan dengan cara melakukan kegiatannya, PKL kelompok ini dikategorikan sebagai kelompok aktivitas permanen.

### C. Berdasarkan Pola Penyebaran

Terdapat dua jenis pola penyebaran pedagang kaki lima menurut Mc. Gee dan Yeung (dalam Budi, 2006: 38), yaitu sebagai berikut:

#### 1. Pola penyebaran memanjang (*linear concentration*)

Terjadi di sepanjang atau pinggir jalan utama atau pada jalan yang menghubungkan jalan utama. Pola perdagangan ini ditentukan oleh pola jaringan jalan itu sendiri dan dipengaruhi oleh pertimbangan aksesibilitas yang tinggi pada lokasi yang bersangkutan.

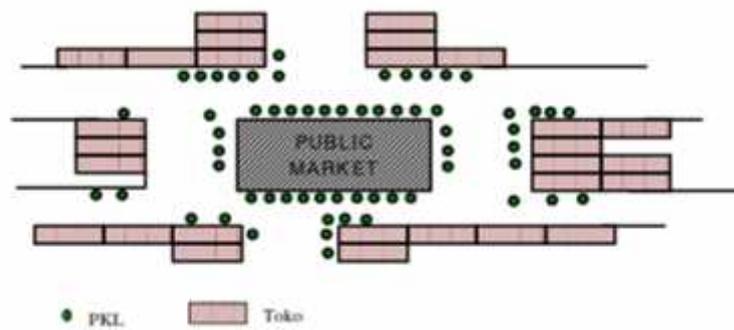


Gambar 2.1 Pola Penyebaran Memanjang (*Linear Concentration*)

Sumber: Ari Sulistyo Budi, 2006

#### 2. Pola penyebaran mengelompok (*focus agglomeration*)

Terjadi dengan memanfaatkan aktivitas-aktivitas di sektor formal dan biasanya pusat-pusat perbelanjaan menjadi salah satu daya tarik lokasi sektor informal untuk menarik konsumennya. Pola perdagangan ini ditentukan oleh pertimbangan aglomerasi, yaitu pemusatan atau pengelompokan pedangan sejenis atau pedagang yang memiliki sifat komoditas yang sama atau saling menunjang.



**Gambar 2.2 Pola Penyebaran Mengelompok (*Focus Agglomeration*)**  
 Sumber: Ari Sulistiyono Budi, 2006

### 2.1.3 Pola Pelayanan Aktivitas Pedagang Kaki Lima

Pola pelayanan menurut Mc. Gee dan Yeung (dalam Ambarwaty, 2003: 43) adalah cara berlokasi aktivitas PKL dalam memanfaatkan ruang kegiatan sebagai tempat usaha. Berdasarkan pola pelayanan ini, aktivitas PKL dapat ditinjau dari aspek fungsi pelayanan, sifat pelayanan, golongan pengguna jasa, skala pelayanan, dan waktu pelayanan.

#### A. Fungsi Pelayanan Pedagang Kaki Lima

Penentuan jenis fungsi pelayanan dari suatu aktivitas jasa PKL dapat ditentukan dari dominasi jenis barang dan jasa yang diperdagangkan. Suatu lokasi aktivitas jasa sektor informal dapat memiliki lebih dari satu fungsi sekaligus. Ada 3 (tiga) macam fungsi pelayanan menurut Soedjana (dalam Pratihari, 1996: 21) yaitu:

1. Fungsi pelayanan perdagangan dan jasa

Aktivitas jasa PKL merupakan bagian dari sistem perdagangan kota, khususnya dalam bidang perdagangan eceran. PKL dalam hal ini berfungsi memasarkan hasil produksi suatu barang dan jasa.

2. Fungsi pelayanan rekreatif

Aktivitas jasa PKL memiliki fungsi sebagai hiburan yang bersifat rekreatif yang didapatkan dari suasana pelayanan yang diberikan. Misalnya, lokasi di alam terbuka dapat dipakai sebagai tempat santai, jalan-jalan dan sebagainya.

3. Fungsi pelayanan sosial ekonomi

Aktivitas jasa PKL memiliki fungsi sosial ekonomi dilihat berdasarkan pandangan masing-masing pelaku yang terlibat didalamnya. Berdasarkan pandangan pedagang, aktivitasnya merupakan sumber pendapatan. Bagi para pengguna, aktivitasnya membantu dalam penyediaan barang dan jasa yang harganya terjangkau. Bagi pemerintah, aktivitasnya membantu pemecahan masalah penyerapan tenaga kerja dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

## **B. Sifat Pelayanan Pedagang Kaki Lima**

Berdasarkan sifat pelayanannya, PKL menurut Mc. Gee dan Yeung (dalam Budi, 2006: 40-41) dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:

### **1. Pedagang menetap**

Adalah suatu bentuk layanan yang mempunyai cara atau sifat menetap pada lokasi tertentu. Dalam hal ini setiap pembeli atau konsumen harus datang sendiri ke tempat pedagang dimana ia berada. Sarana fisik berdagang dengan sifat seperti ini biasanya berupa kios.

### **2. Pedagang semi menetap**

Merupakan suatu bentuk layanan pedagang yang memiliki sifat menetap yang sementara, yaitu pada saat-saat tertentu saja. Dalam hal ini PKL akan menetap bila ada kemungkinan datangnya pembeli yang cukup besar. Apabila tidak ada kemungkinan pembeli yang cukup besar, maka pedagang tersebut berkeliling. Adapun sarana fisik yang dipergunakan untuk berdagang berupa kios beroda.

### **3. Pedagang keliling**

Suatu bentuk layanan pedagang yang dalam melayani konsumennya memiliki sifat yang selalu berusaha mendatangi atau mengejar konsumen. Aktivitas PKL dalam kondisi ini ditunjukkan dengan sarana fisik perdagangan yang mudah dibawa dan volume dagangan kecil. Bentuk sarana fisik yang digunakan untuk berdagang berupa kereta dorong.

## **C. Golongan Pengguna Jasa Pedagang Kaki Lima**

Golongan pengguna jasa yang dilayani oleh aktivitas jasa PKL pada umumnya terdiri dari golongan pendapatan menengah dan rendah. Hal ini disebabkan karena harga yang ditawarkan oleh pedagang relatif lebih rendah sehingga terjangkau bagi golongan pendapatan rendah sekalipun. Sedangkan bagi golongan berpendapatan tinggi ada kecenderungan untuk tidak mengunjungi lokasi aktivitas PKL, terutama untuk jenis barang dagangan bukan makanan. Pertimbangannya adalah dari segi kualitas barang yang biasanya lebih rendah, adanya kemungkinan penipuan dalam hal kualitas barang, sehingga golongan atas lebih memilih untuk belanja di toko atau supermarket. Walaupun demikian tidak tertutup kemungkinan bahwa masyarakat berpendapatan menengah ke atas mendatangi lokasi aktivitas PKL, tetapi ini terjadi sekali waktu atau bersifat insidental (Ambarwaty, 2003: 45).

#### D. Skala Pelayanan Pedagang Kaki Lima

Skala pelayanan suatu aktivitas jasa pedagang kaki lima dapat diketahui dari asal pengguna jasa. Besar kecilnya skala pelayanan tergantung dari jauh dekatnya pengguna jasa tersebut. Semakin dekat asal pengguna, maka skala pelayanan semakin kecil, sebaliknya semakin jauh asal pengguna jasa tersebut, maka skala pelayanan semakin besar (Manning dan Effendi, 1996: 336-372).

#### E. Waktu Pelayanan Pedagang Kaki Lima

Mc. Gee dan Yeung (dalam Budi, 2006: 43) menyatakan bahwa pola aktivitas PKL menyesuaikan terhadap ciri kehidupan masyarakat sehari-hari. Penentuan periode waktu kegiatan PKL didasarkan atau sesuai dengan perilaku kegiatan formal. Adapun perilaku kegiatan keduanya cenderung sejalan, walaupun pada saat tertentu kaitan aktivitas keduanya lemah atau tidak ada hubungan langsung antara keduanya.

Saat teramai pada suatu waktu pelayanan dipengaruhi oleh orientasi jasa terhadap pusat-pusat kegiatan disekitarnya. Saat teramai bagi aktivitas PKL di dekat pusat-pusat perbelanjaan akan berbeda dengan saat-saat teramai di dekat kawasan wisata, permukiman, perkantoran, dan sebagainya.

## 2.2 Sirkulasi

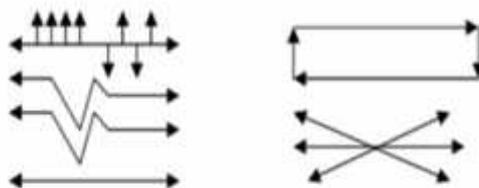
Elemen sirkulasi adalah satu aspek yang kuat dalam membentuk struktur lingkungan perkotaan. Sirkulasi dapat berupa bentuk hubungan atau satu pola bagi yang dapat mengontrol aktivitas kawasan, seperti aktivitas jalan raya, jalur pejalan kaki, dan pusat-pusat kegiatan yang bergerak.

### 2.2.1 Pola Sirkulasi

Menurut D.K Ching (1996) terdapat beberapa pola sirkulasi yang biasa terjadi di perkotaan, diantaranya adalah:

#### A. Linear

Pola sirkulasi linear adalah pola sirkulasi yang berbentuk lurus dan merupakan unsur pembentuk yang paling penting dalam suatu deretan ruang.

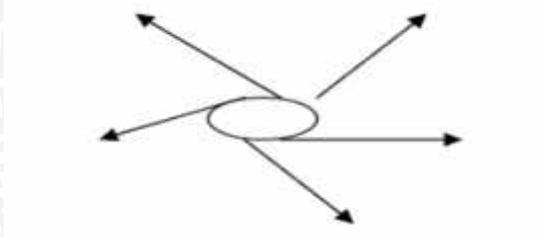


Gambar 2.3 Pola Sirkulasi Linear

Sumber: D.K Ching, 1996

### B. Radial

Pola sirkulasi radial adalah pola sirkulasi yang berkembang dari pusat kegiatan/aktivitas menuju daerah sekitarnya.

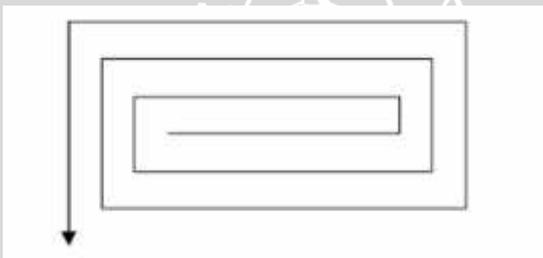


**Gambar 2.4 Pola Sirkulasi Radial**

Sumber: D.K Ching, 1996

### C. Spiral

Pola sirkulasi spiral adalah pola sirkulasi yang berasal dari pusat kegiatan/aktivitas yang berputar menjauhi pusat inti tersebut.

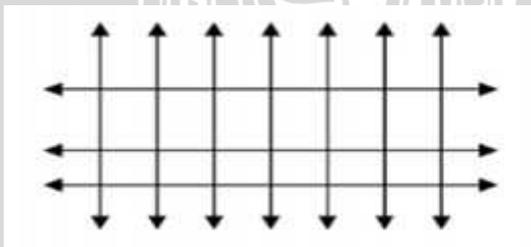


**Gambar 2.5 Pola Sirkulasi Spiral**

Sumber: D.K Ching, 1996

### D. Grid

Pola sirkulasi *grid* adalah pola sirkulasi yang saling berpotongan antara yang satu dengan yang lain dan membentuk segi empat pada kawasan ruang.

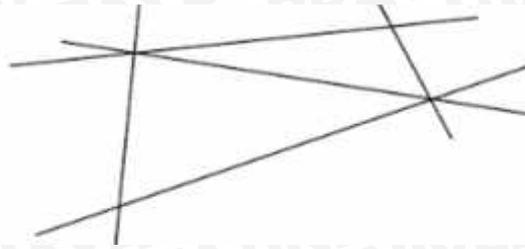


**Gambar 2.6 Pola Sirkulasi Grid**

Sumber: D.K Ching, 1996

### E. Network

Pola sirkulasi *network* adalah pola sirkulasi yang saling berpotongan antara yang satu dengan yang lainnya dan membentuk segi empat pada kawasan ruang.



**Gambar 2.7 Pola Sirkulasi Network**

Sumber: D.K Ching, 1996

## 2.2.2 Prinsip Menangani Sirkulasi

Menurut Shirvani (1985) terdapat 3 (tiga) prinsip utama dalam menangani sirkulasi, yakni:

1. Pertama, jalan seharusnya didesain menjadi ruang terbuka yang memiliki pemandangan yang baik, antara lain: Bersih dan elemen lansekap yang menarik; Persyaratan ketinggian dan garis sempadan bangunan yang berdekatan dengan jalan; Pengaturan parkir di pinggir jalan dan tanaman sebagai penyekat jalan; Meningkatkan lingkungan alami yang terlihat dari jalan.
2. Kedua, jalan harus dapat memberi petunjuk orientasi bagi para pengendara dan dapat menciptakan lingkungan yang dapat dibaca. Dan lebih khusus lagi, yakni: Menciptakan bentuk lansekap untuk meningkatkan kualitas lingkungan kawasan sepanjang jalan tersebut; Mendirikan perabot jalan yang berfungsi pada siang dan malam hari dengan hiasan lampu yang mendukung suasana jalan; Termasuk perencanaan umum jalan dengan pemandangan kota (*vistas*) dan beberapa visual menarik yang dapat berperan sebagai tetenger (*landmark*); Pembedaan susunan dan jalan-jalan penting dengan memberikan perabot jalan (*streetscaping*), trotoar, maju mundurnya batas bangunan (*setback*), penggunaan lahan yang cocok, dan sebagainya.
3. Ketiga, sektor publik dan swasta merupakan partner untuk mencapai tujuan diatas.

## 2.3 Parkir

### 2.3.1 Pengertian Parkir

Menurut PP No. 43 tahun 1993, parkir didefinisikan sebagai kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu atau tidak, serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan atau menurunkan orang dan atau barang. Sedangkan definisi lain tentang parkir adalah keadaan dimana suatu kendaraan berhenti

untuk sementara (menurunkan muatan) atau berhenti cukup lama. Sehingga tempat parkir ini harus ada pada saat akhir atau tujuan perjalanan sudah dicapai (Warpani, 1990).

### 2.3.2 Satuan Ruang Parkir (SRP)

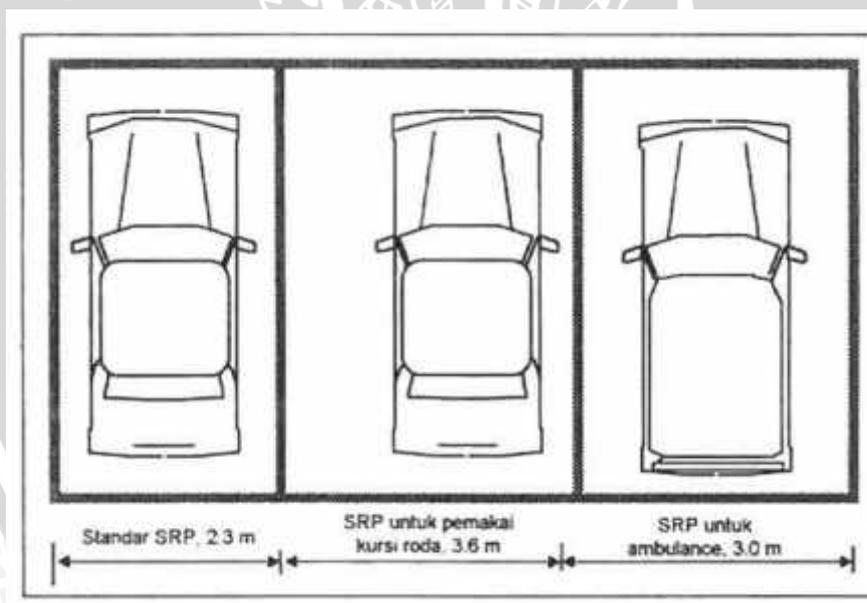
Kebutuhan ruang parkir ditentukan berdasarkan Satuan Ruang Parkir (SRP). Ada berbagai pertimbangan yang diambil untuk menentukan Satuan Ruang Parkir, diantaranya adalah dimensi kendaraan standar untuk mobil penumpang dan ruang bebas kendaraan parkir.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka penentuan Satuan Ruang Parkir (SRP) dibagi menjadi tiga jenis kendaraan dan berdasarkan penentuan SRP untuk mobil penumpang diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) golongan,

**Tabel 2.1 Penentuan Satuan Ruang Parkir (SRP)**

Jenis Kendaraan	Satuan Ruang Parkir(m <sup>2</sup> )
1. a. Mobil Penumpang untuk Golongan I	2,30 x 5,00
b. Mobil Penumpang untuk Golongan II	2,50 x 5,00
c. Mobil Penumpang untuk Golongan III	3,00 x 5,00
2. Bus/truck	3,40 x 12,50
3. Sepeda motor	0,75 x 2,00

Sumber: Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir, 2006



**Gambar 2.8 Satuan Ruang Parkir (SRP) untuk Mobil Penumpang**

Sumber: Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir, 2006

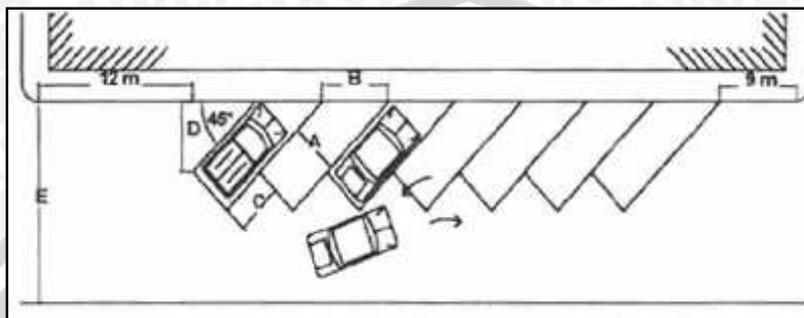


**Tabel 2.2 Lebar Ruang Parkir, Parkir Efektif, dan Ruang Manuver Parkir dengan Sudut 30°**

	A	B	C	D	E
Golongan I	2,3	4,6	3,45	4,70	7,60
Golongan II	2,5	5,0	4,30	4,85	7,75
Golongan III	3,0	6,0	5,35	5,00	7,90

Sumber: Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir, 2006

b. Sudut 45°

**Gambar 2.12 Tata Cara Parkir dengan Sudut 45°**

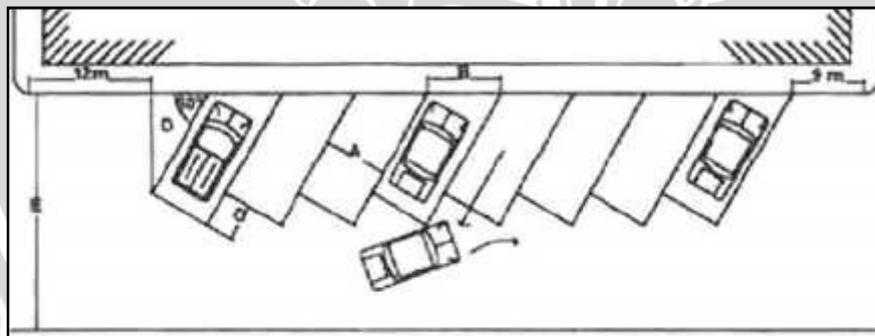
Sumber: Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir, 2006

**Tabel 2.3 Lebar Ruang Parkir, Parkir Efektif, dan Ruang Manuver Parkir dengan Sudut 45°**

	A	B	C	D	E
Golongan I	2,3	3,5	2,5	5,60	9,30
Golongan II	2,5	3,7	2,6	5,65	9,35
Golongan III	3,0	4,5	3,2	5,75	9,45

Sumber: Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir, 2006

c. Sudut 60°

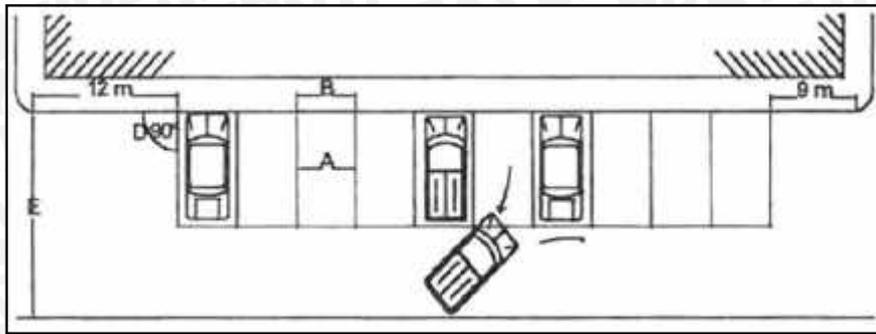
**Gambar 2.13 Tata Cara Parkir dengan Sudut 60°**

Sumber: Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir, 2006

**Tabel 2.4 Lebar Ruang Parkir, Parkir Efektif, dan Ruang Manuver Parkir dengan Sudut 60°**

	A	B	C	D	E
Golongan I	2,3	2,9	1,45	5,95	10,55
Golongan II	2,5	3,0	1,50	5,95	10,55
Golongan III	3,0	3,7	1,85	6,00	10,60

Sumber: Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir, 2006

d. Sudut  $90^{\circ}$ Gambar 2.14 Tata Cara Parkir dengan Sudut  $90^{\circ}$ 

Sumber: Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir, 2006

Tabel 2.5 Lebar Ruang Parkir, Parkir Efektif, dan Ruang Manuver Parkir dengan Sudut  $90^{\circ}$ 

	A	B	C	D	E
Golongan I	2,3	2,3	-	5,4	11,2
Golongan II	2,5	2,5	-	5,4	11,2
Golongan III	3,0	3,0	-	5,4	11,2

Sumber: Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir, 2006

Keterangan:

A : Lebar ruang parkir (m)

B : Lebar kaki ruang parkir (m)

C : Selisih panjang ruang parkir (m)

D : Ruang parkir efektif (m)

M : Ruang manuver (m)

E : Ruang parkir efektif ditambah ruang manuver (m)

## 2.4 Jalur Pejalan Kaki

### 2.4.1 Pengertian Jalur Pejalan Kaki

Jalur pejalan kaki adalah jalur yang disediakan untuk pejalan kaki guna memberikan pelayanan kepada pejalan kaki sehingga dapat meningkatkan kelancaran, keamanan, dan kenyamanan bagi pejalan kaki. Pejalan kaki merupakan salah satu pengguna jalan yang memiliki hak dalam penggunaan jalan. Shirvani (1985) menyatakan bahwa jalur pejalan kaki merupakan fasilitas ruang terbuka publik, apabila berada diantara dua titik pusat pemicu kegiatan, maka akan berfungsi sebagai ruang penghubung yang mendukung kegiatan.

### 2.4.2 Kriteria Jalur Pejalan Kaki

Kriteria jalur pejalan kaki menurut Utermann (1984) adalah *safety* (keselamatan), *convenience* (kondisi menyenangkan), *comfort* (kenyamanan), dan *attractivness* (daya tarik).

### A. *Safety* (Keselamatan)

Keselamatan berarti terlindung dari kecelakaan yang terutama disebabkan oleh kendaraan bermotor maupun oleh kondisi jalur pejalan kaki yang rusak. Keselamatan dalam berjalan menurut Utermann (1984: 26), berhubungan dengan besar kecilnya konflik antara kendaraan yang menggunakan jalan yang sama, keselamatan pengguna dengan karakteristik khusus seperti anak-anak, lansia, dan orang-orang dengan keterbatasan fisik.

### B. *Convenience* (Kondisi Menyenangkan)

Pejalan kaki harus memiliki rute bebas dari hambatan dari satu lokasi ke lokasi lain. Karakteristik perjalanan pejalan kaki yang sesuai bergantung kepada sistem perjalanan yang langsung/ *directness*, kontinuitas, serta ketersediaan jalur pejalan kaki.

Kesenangan meliputi kesesuaian lingkungan dengan kemampuan pejalan kaki, yakni:

1. Nyaman dalam berjalan adalah terbebas dari gangguan yang dapat mengurangi kelancaran pejalan kaki bergerak melakukan perpindahan dari satu tempat ke tempat lain
2. Kesenambungan perjalanan, tidak ada halangan sepanjang jalur pejalan kaki. Halangan dapat berupa kondisi jalur pejalan kaki yang rusak ataupun aktivitas dalam jalur pejalan kaki.
3. Kesenangan, apabila jalur pejalan kaki terlihat menarik dari segi kegiatan dijalur tersebut maupun keindahan. Selain itu berhubungan dengan penyediaan fasilitas pejalan kaki berupa *street furniture*, sehingga pejalan kaki dapat berjalan secara menerus dan berkelanjutan dengan jarak yang masih dalam jangkauan.

### C. *Comfort* (Kenyamanan)

Kenyamanan pejalan kaki adalah ketika pejalan kaki memiliki jalur yang mudah dilalui. Kenyamanan adalah segala sesuatu yang memperlihatkan penggunaan ruang secara harmonis, baik dari segi bentuk, tekstur, warna, aroma, suara, bunyi, cahaya, atau lainnya. Hubungan harmonis yang dimaksudkan adalah keteraturan, dinamis, dan keragaman yang saling mendukung terhadap penciptaan ruang bagi manusia, sehingga mempunyai nilai keseluruhan yang mengandung keindahan. Faktor yang mempengaruhi kenyamanan antara lain:

1. Sirkulasi  
Merupakan perputaran atau peredaran. Aspek-aspek yang terkait dengan sirkulasi pejalan kaki adalah dimensi jalan dan jalur pejalan kaki.
2. Aksesibilitas  
Merupakan derajat kemudahan yang dapat dicapai seseorang terhadap suatu objek, pelayanan ataupun lingkungan.
3. Kebersihan  
Sesuatu yang bersih selain menambah daya tarik lokasi, juga menambah rasa nyaman bagi pejalan kaki karena bebas dari kotoran sampah dan bau-bauan yang tidak menyenangkan.
4. Keindahan  
Merupakan unsur kenyamanan yang mencakup kepuasan batin dan panca indera, sehingga sulit untuk menilai keindahan bagi setiap orang karena memiliki persepsi yang berbeda-beda.

#### D. *Attractiveness* (Daya Tarik)

Pada tempat-tempat tertentu diberikan elemen yang dapat menimbulkan daya tarik seperti elemen estetika, lampu penerangan jalan, dan lain-lain.

#### 2.4.3 Prasyarat dan Penyediaan Prasarana dan Sarana Ruang Pejalan Kaki

Berdasarkan Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Ruang Pejalan Kaki di Perkotaan tahun 2013, ada beberapa fasilitas dasar yang harus terpenuhi dalam penyediaan prasarana ruang pejalan kaki, yaitu: jalur pejalan kaki, *ramp*, marka penyandang cacat, jalur hijau, *street furniture* (perabot kota), dan *signage*. Untuk menciptakan ruang pejalan kaki yang aman, nyaman, mudah, dan indah, maka dibutuhkan beberapa persyaratan seperti pada **Tabel 2.6**

**Tabel 2.6** Kebutuhan Prasarana dan Sarana Ruang Pejalan Kaki

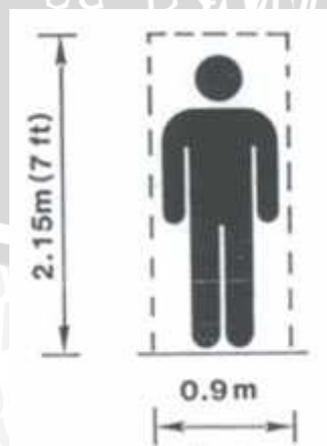
Fasilitas	Aksesibilitas	Keselamatan	Kenyamanan	Keindahan	Kemudahan
Prasarana ruang pejalan kaki	Dapat diakses oleh semua pejalan kaki termasuk yang memiliki keterbatasan fisik	Ruang pejalan kaki harus terpisah dari jalur lalu lintas kendaraan dan memiliki ketinggian yang berbeda	- Memiliki lebar yang nyaman (min. 1,5 m) - Jalur pejalan kaki memiliki permukaan yang tidak licin	Ruang pejalan kaki memiliki material penutup tanah yang berpola dan memiliki daya serap tinggi	- Jalur mudah dicapai dan tidak terhalangi oleh apapun - Jalur harus menerus dari titik satu ke titik lainnya
Perabot kota ( <i>street furniture</i> )	Perabot kota terletak pada lokasi yang mudah dijangkau	Terletak pada titik-titik yang aman dari lalu lintas kendaraan	- Memiliki tingkat kenyamanan yang tinggi dengan bahan	Desain dapat mewakili karakter lokal lingkungan,	Terletak pada titik yang mudah untuk dicapai

Fasilitas	Aksesibilitas	Keselamatan	Kenyamanan	Keindahan	Kemudahan
			yang sesuai kebutuhan - Tata letaknya tidak mengganggu alur pejalan kaki	sehingga memiliki kualitas estetika yang baik	
<i>Signage</i>	<i>Signage</i> harus dapat terlihat dengan mudah	Terletak pada titik-titik yang aman dari tindakan vandalisme	Tata letaknya tidak mengganggu alur pejalan kaki	Desain dapat mewakili karakter lokal lingkungan, sehingga memiliki kualitas estetika yang baik	Terletak pada lokasi yang mudah untuk dilihat
<i>Ramp</i>	Harus dapat digunakan oleh penyandang cacat dalam mencapai tujuan	Terletak pada lokasi yang aman dari sirkulasi kendaraan	Memiliki derajat kemiringan yang sesuai standar kenyamanan (1:12)	Memiliki penanda khusus berupa pagar pembatas atau garis berwarna	Terletak pada titik strategis pada arus pedestrian padat
Jalur hijau	Pemilihan jenis tanaman yang dapat berguna sebagai penunjuk arah	Terletak antara jalur pejalan kaki dan kendaraan	Memiliki vegetasi peneduh untuk penurun iklim mikro	Memiliki vegetasi dekoratif yang meningkatkan nilai estetika ruang	Vegetasi juga berupa pengarah pada ruang pejalan kaki

Sumber: Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Ruang Pejalan Kaki di Perkotaan, 2013

#### 2.4.4 Standar Teknis Prasarana Ruang Pejalan Kaki

Ukuran lebar efektif minimum jalur pejalan kaki berdasarkan kebutuhan orang adalah 60 cm ditambah 15 cm untuk bergerak tanpa membawa barang, sehingga kebutuhan total minimal untuk 2 orang pejalan kaki berpapasan menjadi 150 cm.



**Gambar 2.15 Lebar Ruang Orang Berjalan Secara Keseluruhan**

Sumber: Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Ruang Pejalan Kaki di Perkotaan, 2013

Lebar jalur pejalan kaki berdasarkan lokasi menurut Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Ruang Pejalan Kaki di Perkotaan tahun 2013 disajikan pada **Tabel 2.7** berikut ini.

**Tabel 2.7 Lebar Jalur Pejalan Kaki Berdasarkan Lokasi**

No	Lokasi ruang pejalan kaki	Lebar minimal
1	Jalan di daerah perkotaan atau kaki lima	4 m
2	Di wilayah perkantoran utama	3 m
3	Di wilayah industri	
	a. Pada jalan primer	3 m
	b. Pada jalan akses	4 m
4	Di wilayah permukiman	
	a. Pada jalan primer	2,75 m
	b. Pada jalan akses	2 m

Sumber: Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Ruang Pejalan Kaki di Perkotaan, 2013

Ruang pejalan kaki memiliki perbedaan ketinggian baik dengan jalur kendaraan bermotor ataupun dengan jalur hijau. Perbedaan tinggi maksimal antara ruang pejalan kaki dan jalur kendaraan bermotor adalah 20 cm. Sedangkan perbedaan ketinggian dengan jalur hijau 15 cm.

## 2.5 Perabot Kota

Perabot kota atau *street furniture* adalah elemen-elemen ruang pada ruang publik yang dapat memberikan kenyamanan bagi pengguna, seperti: tempat duduk, pohon peneduh, dan tempat parkir (Shirvani, 1985). Elemen-elemen ini menjadi penting untuk menghidupkan dan meningkatkan kualitas ruang publik. Selain itu, perabot kota adalah objek atau perlengkapan yang dipasang di jalan untuk tujuan tertentu termasuk didalamnya kursi, trotoar, kotak pos, telepon umum, papan informasi, lampu-lampu lalu lintas, halte bis, dan lain sebagainya.

Berdasarkan cara peletakannya, perabot kota memiliki kaidah-kaidah sebagai berikut:

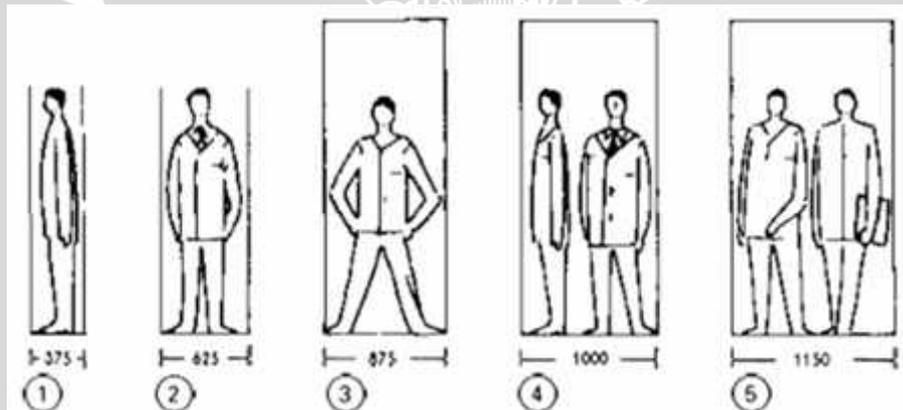
1. Fungsi utama perabot kota adalah sebagai petunjuk dan pelayanan terhadap pengguna, sehingga dengan adanya perabot kota pengguna merasa nyaman didalam menjalankan aktivitasnya. Sebagai contoh: berjalan kaki, bersantai, menikmati keindahan tata lampu, serta sambil berbelanja dapat memanfaatkan fasilitas lain disepanjang jalan.
2. Fungsi seni, yaitu peletakan perabot kota di sepanjang jalan mengikuti kaidah-kaidah seni. Baik cara peletakan elemen-elemen itu sendiri maupun desain yang diharapkan memiliki nilai seni tinggi, sekaligus kualitas bahan yang baik.

Sedangkan tujuan adanya elemen-elemen perabot kota dapat dikategorikan menjadi:

1. Orientasi adalah tanda-tanda yang diletakkan di suatu lingkungan bisa berupa peta, petunjuk tempat di beberapa lokasi penting.
2. Informasi adalah semua informasi dalam bentuk tulisan yang ditujukan untuk pengguna jalan.
3. Direksional adalah tanda-tanda yang mengarahkan seperti rambu lalu lintas.
4. Identifikasi adalah tanda-tanda yang menginformasikan suatu tempat tertentu.
5. Ornamental adalah tanda-tanda yang menambah keindahan pada lingkungan tertentu seperti pagar, lampu penerangan.

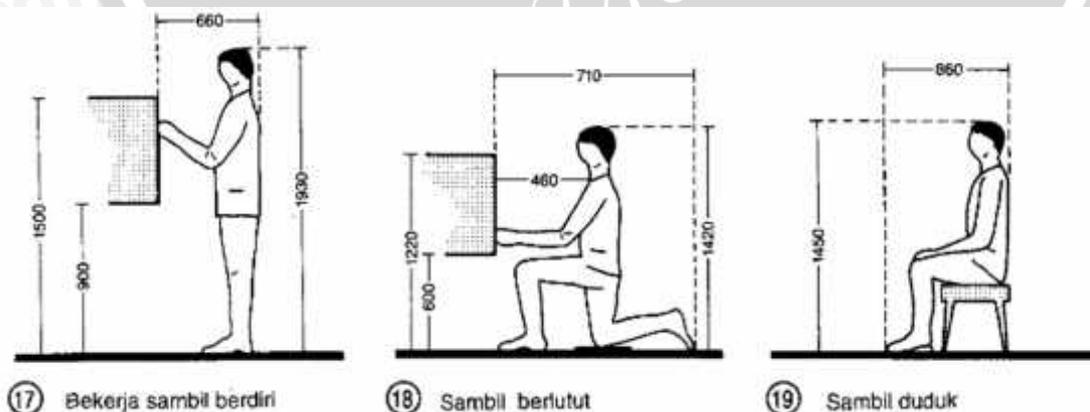
## 2.6 Tinjauan Standar Kebutuhan Ruang

Beberapa standar ruang yang digunakan dalam analisis kebutuhan ruang menurut Ernst dan Peter Neufert (1996: 16-17):



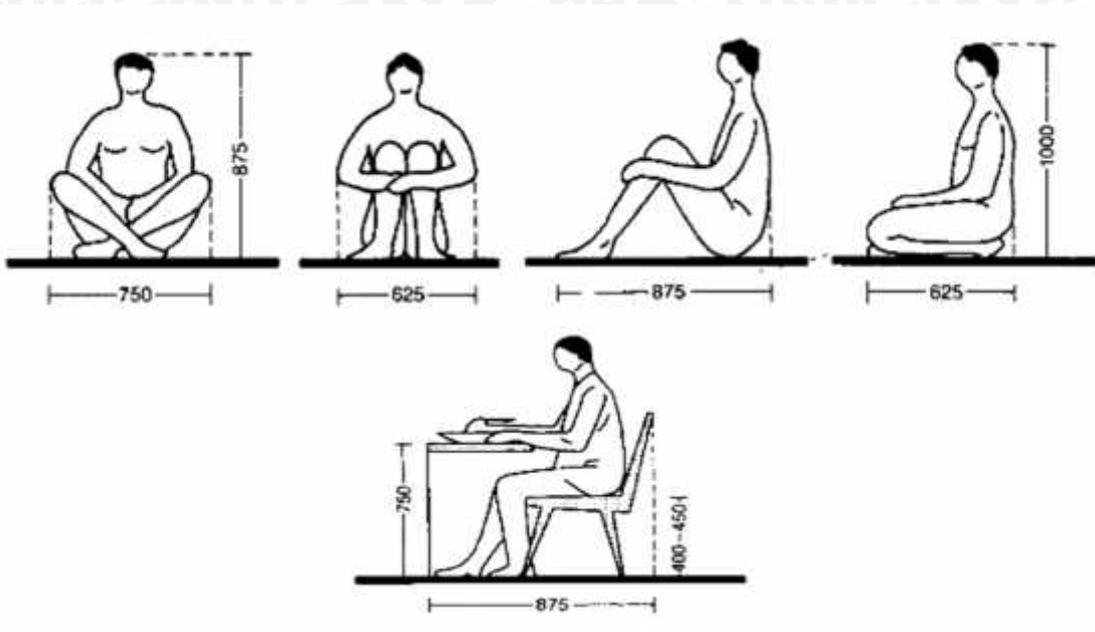
Gambar 2.16 Standar Kebutuhan Ruang Sirkulasi Vertikal

Sumber: Ernst dan Peter Neufert, 1996



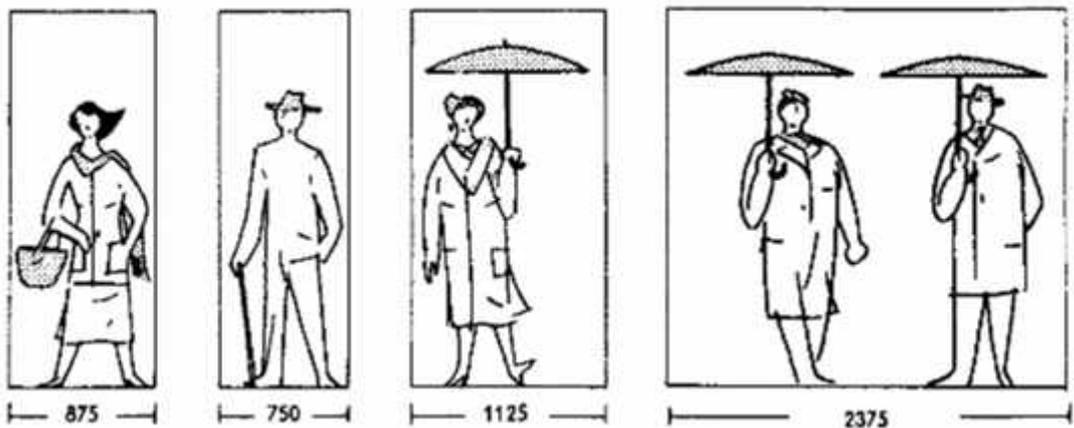
Gambar 2.17 Standar Kebutuhan Ruang Bekerja

Sumber: Ernst dan Peter Neufert, 1996



**Gambar 2.18 Standar Kebutuhan Ruang Aktivitas Duduk**

Sumber: Ernst dan Peter Neufert, 1996



**Gambar 2.19 Standar Kebutuhan Ruang Dengan Tongkat dan Payung**

Sumber: Ernst dan Peter Neufert, 1996

## 2.7 Tinjauan Kebijakan

Berikut kebijakan terkait PKL yang tersusun dalam draft Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek.

### 2.7.1 Draft RDTR Kecamatan Trenggalek

Konsep pengembangan yang diberikandalam draft RDTR Kecamatan Trenggalek tahun 2013-2033 meliputi arahan lokasi/ relokasi PKL, konsep-konsep penataan PKL berikut alternatif visualisasi penataannya, arahan PKL sesuai tata lingkungan dan ketersediaan lahan, serta penertiban dan pengendalian laju pertumbuhan PKL. Arahan lokasi dan konsep penataan adalah sebagaimana pada **Tabel 2.8** berikut ini.

**Tabel 2.8 Arahan Lokasi dan Konsep Penataan PKL di Kecamatan Trenggalek**

No.	Lokasi PKL Eksisting	Arahan Lokasi	Konsep Penataan
1.	PKL Sekitar Pendopo Kabupaten	Tetap	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemberlakuan jam operasi</li> <li>▪ Sentra temporer dengan konsep tenda bongkar pasang</li> <li>▪ Sentra pujasera dan arena bermain anak.</li> <li>▪ Menggunakan bahu jalan dan pemberlakuan zona bebas kendaraan pada saat PKL beroperasi (T-Walk).</li> </ul>
2.	PKL Jl. Dr. Sutomo (Depan SMP 1 Trenggalek dan RSUD dr. Soedomo).	Tetap	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemberlakuan jam operasi</li> <li>▪ Sentra temporer dengan konsep tenda bongkar pasang</li> </ul>
3.	PKL Pasar Sore	Tetap (areal pasar sore)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sentra Pujasera</li> <li>▪ Pemberlakuan jam operasi</li> <li>▪ Sentra temporer dengan konsep tenda bongkar pasang</li> </ul>
4.	PKL Stadion	Halaman Stadion Menak Sopal	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sentra Pujasera dan arena bermain anak</li> <li>▪ Pasar kaget akhir pekan</li> <li>▪ Pemberlakuan jam operasi</li> <li>▪ Sentra temporer dengan konsep tenda bongkar pasang</li> </ul>
5.	PKL Sekitar Pasar Pon	Bekas Pasar Basah dan Bekas Terminal MPU	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sentra Pujasera</li> </ul>
6.	PKL Sekitar Terminal Bus Surodakan	Penyediaan area PKL di terminal atau sekitar terminal Area PKL pada Zona perdagangan dan jasa Soetran.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penataan PKL di area terminal (penyediaan area terminal sebagai sentra makanan dan buah)</li> <li>▪ Sentra pujasera permanen pada zona perdagangan dan jasa Soetran (pada bangunan inti) dan konsep tenda (pada tepi bangunan inti)</li> </ul>
7.	PKL Sekitar Pasar Jarakan (pertigaan Jarakan)	Pasar Jarakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Konsep tenda bongkar pasang</li> </ul>

Sumber: Draft RDTR Kecamatan Trenggalek Tahun 2013-2033

## 2.8 Persepsi

### 2.8.1 Pengertian Persepsi

Menurut kamus besar psikologi, persepsi diartikan sebagai suatu proses pengamatan seseorang terhadap lingkungan dengan menggunakan indera yang dimiliki sehingga seseorang menjadi sadar akan segala sesuatu yang ada dilingkungannya. Dalam Kamus besar Bahasa Indonesia, persepsi diartikan sebagai proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Dalam penelitian ini, persepsi diartikan sebagai proses untuk mengetahui, merasa, dan memahami keadaan PKL maupun lingkungan sekitar PKL melalui hasil pengamatan panca inderanya.

## 2.8.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi antara lain:

### 1. Faktor internal

Individu sebagai faktor internal saling berinteraksi dalam individu mengadakan persepsi. Mengenai keadaan individu yang dapat mempengaruhi hasil persepsi datang dari dua sumber, yaitu berhubungan dengan segi kejasmanian dan segi psikologis. Bila sistem fisiologis terganggu, hal tersebut akan berpengaruh dalam persepsi seseorang. Sedangkan segi psikologis yaitu antara lain mengenai pengalaman, perasaan, kemampuan berpikir, kerangka acuan, dan motivasi akan berpengaruh pada seseorang dalam mengadakan persepsi.

### 2. Faktor eksternal

#### a. Stimulus

Agar stimulus dapat dipersepsi, maka stimulus harus cukup kuat. Kejelasan stimulus akan banyak berpengaruh dalam persepsi. Stimulus yang kurang jelas akan berpengaruh dalam ketepatan persepsi. Bila stimulus berwujud benda-benda bukan manusia, maka ketepatan persepsi lebih terletak pada individu yang mengadakan persepsi, karena benda yang dipersepsi tersebut tidak ada usaha untuk mempengaruhi yang mempersepsi.

#### b. Lingkungan atau situasi

Lingkungan atau situasi khususnya yang melatarbelakangi stimulus juga akan berpengaruh dalam persepsi bila obyek persepsi adalah manusia. Obyek dan lingkungan yang melatarbelakangi obyek merupakan kesatuan yang sulit dipisahkan. Obyek yang sama dengan situasi sosial yang berbeda dapat menghasilkan persepsi yang berbeda (Walgito, 2002: 46-47).

### 3. Faktor fungsional

Faktor fungsional berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu, dan hal-hal lain yang termasuk apa yang kita sebut sebagai faktor-faktor personal.

#### a. Persepsi bersifat selektif secara fungsional

Persepsi bersifat selektif secara fungsional adalah bahwa obyek yang mendapat tekanan dalam persepsi biasanya obyek-obyek yang memenuhi tujuan individu yang melakukan persepsi. Misalnya seperti pengaruh kebutuhan, kesiapan mental, suasana emosional, dan latar belakang budaya terhadap persepsi.

b. Kerangka rujukan (*Frame of Reference*)

Faktor-faktor fungsional yang mempengaruhi persepsi lazim disebut sebagai kerangka rujukan. Mula-mula konsep ini berasal dari penelitian psikofisik yang berkaitan dengan persepsi obyek. Para psikolog sosial menerapkan konsep ini untuk menjelaskan persepsi sosial. Dalam kegiatan komunikasi, kerangka rujukan mempengaruhi bagaimana orang memberi makna pada pesan yang diterimanya.

4. Faktor struktural

- a. Sifat stimulus fisik dan efek- efek yang ditimbulkan pada sistem saraf individu. Maksudnya adalah bahwa untuk memahami suatu peristiwa tidak hanya meneliti fakta-fakta yang terpisah tetapi harus memandang dalam hubungan keseluruhan atau untuk memahami seseorang harus melihat dalam kontesnya, lingkungannya, dan masalah yang dihadapi.
- b. Medan perseptual dan kognitif selalu diorganisasikan dan diberi arti. Dalam mengorganisasikan stimulus harus dengan melihat konteks. Walaupun stimulus yang diterima tidak lengkap, kita akan mengisinya dengan interpretasi yang konsisten dengan rangkaian stimulus yang dipersepsi.
- c. Sifat-sifat perseptual dan kognitif dari substruktur ditentukan pada umumnya oleh sifat-sifat struktur secara keseluruhan. Jika individu dianggap sebagai anggota kelompok, semua sifat individu yang berkaitan dengan sifat kelompok dipengaruhi oleh keanggotaan kelompoknya, dengan efek berupa asimilasi atau kontras.
- d. Obyek atau peristiwa yang berdekatan dalam ruang dan waktu atau menyerupai satu sama lain, cenderung ditanggapi sebagai bagian dari struktur yang sama. Stimulus yang berdekatan satu sama lain akan dianggap satu kelompok.

Menurut Sarlito Wirawan Sarwono (1996: 43-44), dalam bukunya “Pengantar Umum Psikologi” terdapat 6 faktor yang menyebabkan perbedaan persepsi, yaitu:

1. Perhatian

Biasanya seseorang tidak menangkap seluruh rangsang yang ada di sekitar kita sekaligus, tetapi memfokuskan perhatian pada satu atau dua obyek saja. Perbedaan fokus antara satu orang dengan orang lain menyebabkan perbedaan persepsi.

2. Set  
Set adalah harapan seseorang akan rangsang yang akan timbul.
3. Kebutuhan  
Kebutuhan-kebutuhan sesaat maupun yang menetap pada diri seseorang akan mempengaruhi persepsi seseorang. Kebutuhan yang berbeda akan menyebabkan persepsi yang berbeda pula.
4. Sistem nilai  
Sistem nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat berpengaruh terhadap persepsi.
5. Ciri kepribadian  
Ciri kepribadian akan mempengaruhi persepsi pula.
6. Gangguan kejiwaan  
Gangguan kejiwaan dapat menimbulkan kesalahan persepsi yang disebut halusinasi. Berbeda dari ilusi, halusinasi bersifat individual, hanya dialami oleh penderita yang bersangkutan saja.

## 2.9 IPA (*Importance Performance Analysis*)

*Important Performance Analysis* (IPA) adalah suatu metode analisis kombinasi antara atribut-atribut tingkat kepentingan dan persepsi terhadap kualitas pelayanan kedalam bentuk dua dimensi. Hasil analisis meliputi empat saran berbeda berdasarkan ukuran tingkat kepentingan (*importance*) dan kualitas pelayanan (*performance*), yang kemudian dapat dipergunakan sebagai dasar untuk menetapkan strategi selanjutnya. Terdapat 2 buah variabel, yaitu X dan Y, dimana X merupakan persepsi terhadap kualitas pelayanan, sedangkan Y merupakan tingkat kepentingan. Secara umum, langkah-langkah IPA adalah sebagai berikut: (Magal dan Levenburg, 2005)

- a. Mengidentifikasi elemen-elemen atau aspek-aspek kritis yang akan dievaluasi.
- b. Mengembangkan instrumen survei yang akan digunakan untuk mendapatkan penilaian tingkat keentingan serta kinerja dari elemen-elemen atau aspek-aspek yang diperoleh dengan pembobotan. Untuk menentukan nilai, maka digunakan skala pengukuran skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok tentang kejadian atau gejala sosial (Riduwan, 2003:12). Dengan menggunakan skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi dimensi, dimensi dijabarkan menjadi sub-variabel, kemudian sub-variabel akan dijabarkan lagi menjadi indikator-indikator yang dapat diukur. Akhirnya indikator-indikator yang terukur tersebut dapat dijadikan

titik tolak untuk membuat *item* instrumen yang berupa pertanyaan atau pernyataan yang perlu dijawab oleh responden. Setiap jawaban dihubungkan dengan bentuk pernyataan atau dukungan yang diungkapkan dengan kata-kata sebagai berikut:

Pernyataan Tingkat Kepuasan		Pernyataan Tingkat Kepentingan	
Sangat memuaskan	= 5	Sangat penting	= 5
Memuaskan	= 4	Penting	= 4
Cukup memuaskan	= 3	Cukup penting	= 3
Kurang memuaskan	= 2	Kurang penting	= 2
Tidak memuaskan	= 1	Tidak penting	= 1

- c. Menghitung nilai tingkat kesesuaian (Tki), dimana besarnya nilai Tki menggambarkan kepuasan responden terhadap kondisi PKL sekitar pendopo kabupaten. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung tingkat kesesuaian adalah:

$$Tki = \frac{Xi}{Yi} 100\%$$

#### Keterangan

Tki : Tingkat kesesuaian

Xi : Skor penilaian persepsi

Yi : Skor penilaian kepentingan

Responden akan merasa puas apabila penilaian terhadap tingkat kepuasan sebanding dengan tingkat kepentingan yang diharapkan. Apabila nilai keseluruhan masing-masing atribut melebihi nilai kesesuaian rata-rata seluruh atribut, maka responden dinilai sangat puas. Sedangkan jika dibawah nilai kesesuaian rata-rata seluruh atribut menandakan bahwa atribut tersebut perlu ditingkatkan kualitasnya.

- d. Menghitung nilai rata-rata tingkat kepentingan serta kinerja masing-masing elemen yang ditujukan untuk mengetahui posisi masing-masing atribut pada diagram kartesius. Diagram kartesius dalam IPA merupakan suatu bangun yang dibagi menjadi empat bagian yang dibatasi oleh dua buah garis yang berpotongan tegak lurus pada titik-titik (X,Y), dimana X merupakan rata-rata dari skor tingkat kepuasan terhadap seluruh atribut, sedangkan Y adalah rata-rata dari skor tingkat kepentingan seluruh faktor yang mempengaruhi kepuasan. Rumusnya adalah:

$$\bar{X} = \frac{\sum Xi}{n} \quad \bar{Y} = \frac{\sum Yi}{n}$$

### 2.10 Best Practice

Berikut merupakan penerapan penataan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Surakarta yang dianggap cukup berhasil dalam implementasinya.

### 2.10.1 Latar Belakang

Persoalan PKL tidak lagi sebagai urusan penggunaan fasilitas umum untuk berdagang para PKL, tetapi berhubungan dengan urusan perut warga. Banyak PKL yang ‘*waton manggon*’ “asal menempati” dengan alasan tidak ada lagi yang dapat dilakukan untuk mencari penghidupan. Mereka tidak tertib, melanggar peraturan yang berlaku, dan tidak berwawasan lingkungan dalam berdagang. Lingkungan menjadi kumuh dan kemacetan terjadi dimana-mana. Perda No. 8 Tahun 1995 tentang Penataan dan Pembinaan PKL, serta SK Walikota No. 2 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Perda No. 8 Tahun 1995 tidak lagi efektif digunakan untuk menata PKL. Alasannya adalah bahwa Perda dan SK Walikota tersebut dinilai tidak lagi relevan dengan realitas kondisi PKL sekarang. Selain itu, Perda dan SK tersebut juga dinilai tidak akomodatif dan tidak berpihak kepada kepentingan PKL. Setiap dilakukan penataan dan penertiban selalu ditafsir negatif, sehingga timbul aksi pembangkangan. Untuk itu, penataan dan pembinaan PKL mendesak untuk ditangani agar tidak menjadi masalah lebih besar di kemudian hari.



Gambar 2.20 Gambaran PKL di Kota Surakarta

### 2.10.2 Permasalahan

Permasalahannya adalah bagaimana menyusun pola penataan PKL yang solutif dan aplikatif, yang di satu sisi menjamin pemberdayaan usaha PKL yang tidak lagi menjadi masalah pembangunan dan di sisi lain dapat digunakan Pemkot untuk menata dan membina PKL agar menjadi subjek pembangunan kota. Tujuan penelitian pada tahun I adalah tersusunnya konsep pola penataan PKL di Kota Surakarta yang mengakomodasi seluruh kepentingan dan harapan dari para PKL, warga masyarakat, dan Pemkot Kota Surakarta, khususnya menyangkut kehidupan aspek ekonomi, sosial dan hukum. Pada tahun II konsep pola penataan ini akan disempurnakan menjadi pola penataan yang baku, dan pada tahun III diharapkan dapat tersusun draf Raperda yang akan diusulkan menjadi Perda.

### 2.10.3 Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah harapan dan kepentingan PKL, Warga Masyarakat Kota, dan Pemkot menurut tinjauan aspek ekonomi, sosial dan

hukum, (2) tingkat keterkaitan usaha PKL dengan lingkungan dan pembeli, dan (4) rencana pembelian.

#### **2.10.4 Metode Penelitian**

Penelitian eksplorasi berkelanjutan ini (Michael Walizer, 1991: 64-67), dilaksanakan di wilayah kota Surakarta yang meliputi Kecamatan Laweyan, Kecamatan Serengan, Kecamatan Pasar Kliwon, Kecamatan Jebres, dan Kecamatan Banjarsari. Peneliti berusaha menggali data dan informasi dari sumber data tentang kepentingan dan harapan PKL, kepentingan dan harapan warga masyarakat Kota Surakarta terhadap penataan PKL dan Pemkot Surakarta (200 warga kota). Data dikumpulkan dengan angket, wawancara, dan kajian dokumen dari PKL Surakarta, 200 warga Kota, dan produk peraturan dan kebijakan Pemkot, yang meliputi Perda No. 8 Tahun 1995 (Pemkot), SK No. 2 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 1995, RUTRK Kota Surakarta 2003- 2013 (Bapeda dan Tata Kota), Perda No. 6 Tahun 2003 tentang POLDAS Kota Surakarta Tahun 2003 – 2008, RENSTRA Kota Surakarta Tahun 2002-2006, Instruksi Walikota No. 660.1/26/III/1988 tentang Peningkatan dan Pelestarian Program Berseri di Kotamadia Surakarta. Data selanjutnya diolah menjadi data dasar untuk menyusun konsep pola penataan dan draft Raperda. Analisis data menggunakan analisis deskriptif model Kerby dan MC Kenna (dalam Kristi Purwandari, 1996). Langkah analisis sebagai berikut:

- a. Menganalisis penelitian didasarkan pada kepentingan dan harapan subjek penelitian
- b. Mengelompokkan kepentingan dan harapan subjek penelitian berdasar pada aspek ekonomi, sosial, dan hukum pada suatu pemetaan (*mapping*).
- c. Memastikan bahwa kepentingan dan harapan-harapan telah terdeskripsikan secara jelas dan dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan pengkajian lebih lanjut, yaitu untuk menyusun pola penataan PKL di Surakarta.

#### **2.10.5 Hasil dan Pembahasan**

Berdasarkan hasil pemetaan diperoleh gambaran tentang kepentingan dan harapan PKL, warga masyarakat Kota Surakarta, dan Pemerintah Kota Surakarta sebagai berikut. Kepentingan Pemkot adalah memajukan kesejahteraan umum, salah satunya dengan memberdayakan usaha PKL sebagai pemberdayaan ekonomi rakyat, dengan memberikan jaminan termasuk perlindungan, pembinaan dan pengaturan dalam melakukan usaha agar lebih berdayaguna dan berhasilguna, serta meningkatkan kesejahteraan mereka.

Kepentingan PKL meliputi (1) berdagang dengan aman dan tidak takut digusurdengan jaminan perlindungan, pembinaan dan pengaturan dari pemerintah, (2)

berdagang yang mendatangkan penghasilan, (3) mengembangkan usaha untuk sandaran hidup, dan (4) memperoleh kepastian hukum atas usaha dan lokasi tempat berdagang.

Kepentingan warga masyarakat meliputi terpenuhinya beberapa kebutuhan dari pelayanan PKL, terbukanya kesempatan kerja dan peluang mendapatkan pendapatan bagi warga sekitar usaha sektor PKL, dan terciptanya lingkungan tempat tinggal dan lingkungan kota yang asri, tertib, dan aman.

#### 2.10.6 Arahan Rencana

Beberapa konsep penataan PKL sebagai paduan kepentingan ketiga komponen tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Relokasi ke suatu tempat untuk PKL yang memiliki spesifikasi produk.
- b. Pembentukan *zoning* (pembentukan kawasan PKL) untuk menampung PKL yang diperlukan masyarakat sekitar, tetapi berdagang di daerah larangan.
- c. Pembentukan *zoning* dengan membangun kios bekerja sama dengan instansi yang memiliki lahan luas dan komunitasnya sangat membutuhkan pelayanan PKL, seperti kompleks sekolah, rumah sakit, perkantoran besar dan sebagainya. Selain itu, dapat pula meminta setiap Mall dan Pasar Swalayan untuk menyediakan lahan khusus untuk PKL.
- d. Pembuatan *Shelter* sebagai fasilitas umum untuk berlindung warga dan saat-saat tertentu dapat digunakan untuk tempat usaha PKL. *Shelter* dibangun di daerah/kawasan yang masih terdapat ruang/ tanah negara di tepi jalan-jalan umum.
- e. Penggunaan tenda *knock down* (bongkar pasang) dan gerobak dorong untuk tempat dan sarana dagang PKL yang menempati daerah-daerah keramaian dengan memperhatikan keindahan dan keamanan lingkungan.
- f. Pembinaan dan penataan nonfisik secara rutin oleh Pemkot dengan tujuan mengubah mental dan perilaku PKL yang menganut prinsip “pokoknya” menjadi warga yang sadar hukum dan berwawasan lingkungan.
- g. Penertiban dan penegakan Perda secara rutin yang bertujuan agar perundangundangan dan peraturan dipatuhi bersama, dan PKL yang membandel dan tidak mengindahkan peraturan diberi surat teguran dan peringatan, dan selanjutnya dikirim rekomendasi pada Tim Penegak Perda untuk dilakukan tindakan yustisi.

Selain itu, konsep pola penataan juga didasarkan atas: (1) paduan kepentingan PKL, Warga Masyarakat Kota, dan Pemkot menurut tinjauan aspek ekonomi, sosial dan hukum,

(2) tingkat keterkaitan usaha PKL dengan lingkungan dan pembeli, dan (4) rencana pembelian.

### 2.10.7 Implementasi Rencana

Penempatan lokasi usaha PKL dilakukan dengan mempertimbangkan keterikatan usaha PKL dengan lingkungan dan konsumen, latar belakang kebutuhan konsumen (direncanakan terlebih dahulu atau tidak), dan keindahan lingkungan, keamanan, serta ketertiban.



Gambar 2.21 Pembentukan Zoning dengan Membangun Kios-Kios untuk PKL



Gambar 2.22 Pembuatan Shelter sebagai Fasilitas Umum untuk Warga dan Tempat Usaha PKL



Gambar 2.23 Penggunaan Tenda Knock-Down (Bongkar Pasang) bagi PKL

## 2.11 Studi Terdahulu

Terdapat beberapa studi yang berkaitan dengan penelitian ini. Beberapa studi terdahulu ini dapat mendukung penelitian mengenai Penataan PKL sekitar Pendopo Kabupaten Trenggalek berdasarkan Persepsi dan Kebutuhan Ruang.



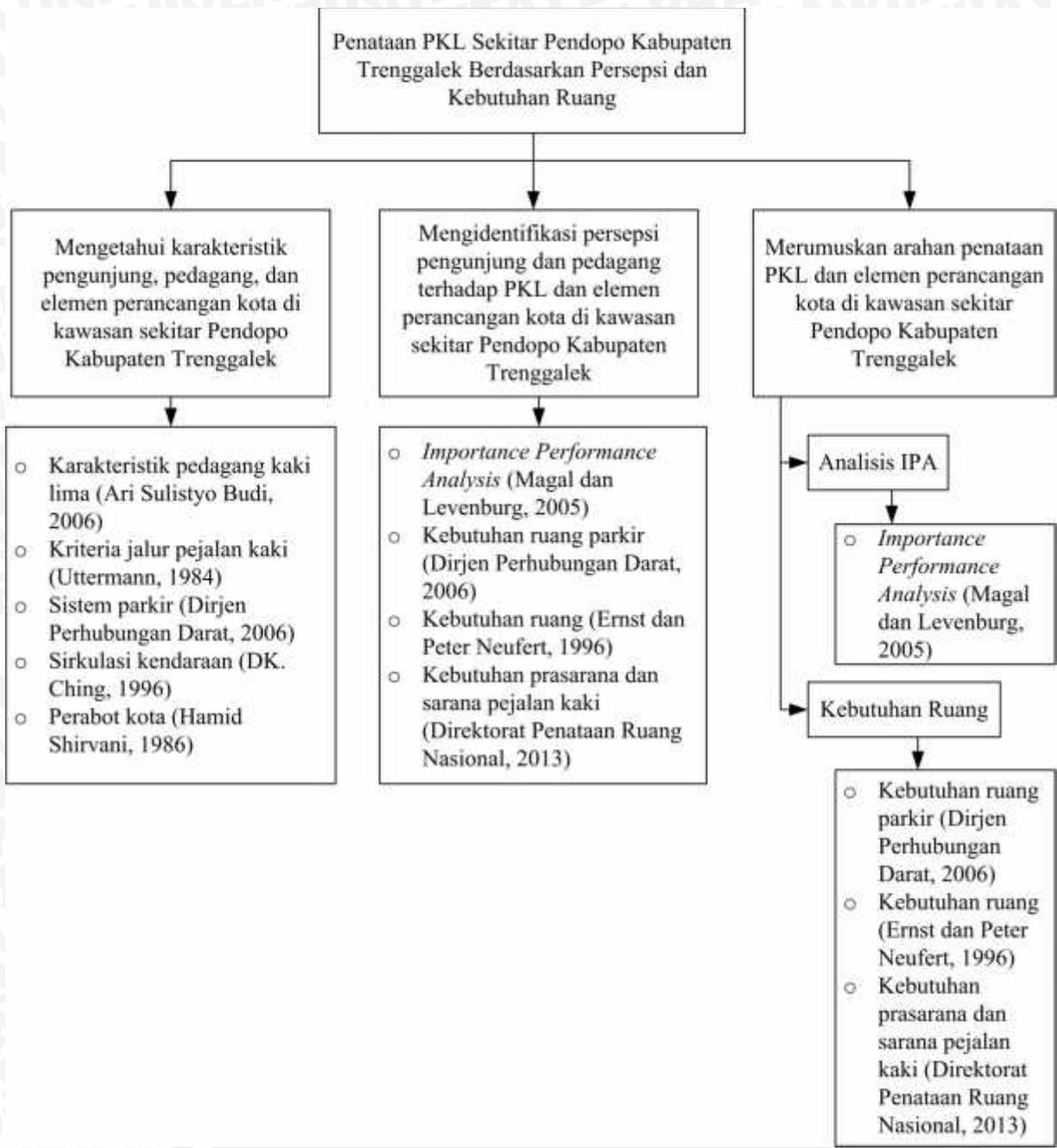
Tabel 2.9 Tinjauan Studi Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan	Variabel Penelitian	Metode Penelitian				Hasil	Perbedaan
					Deskriptif	Analisis IPA	Analisis Kebutuhan Ruang	Content Analysis		
1.	Ari Sulistiyo Budi (2006)	Kajian Lokasi Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Preferensi PKL serta Persepsi Masyarakat sekitar Di Kota Pemalang	Mengetahui karakteristik dan preferensi PKL pada lokasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, serta persepsi masyarakat terhadap keberadaan PKL	<p>1. Karakteristik PKL: karakteristik umum, karakteristik usaha, karakteristik lokasi aktivitas</p> <p>2. Preferensi PKL mengenai kondisi yang diinginkan dalam berdagang: pengelompokan PKL, perlu/tidaknya pengaturan PKL, apa saja yang diatur, fasilitas apa yang ditambah</p> <p>3. Persepsi masyarakat terhadap keberadaan PKL: manfaat atau gangguan dari PKL, alasan berbelanja di PKL</p>	✓	✓			<p>1. Berdasarkan penelitian menggunakan analisis preferensi diperoleh preferensi PKL terhadap keberadaannya, pengaturan PKL, kesesuaian lokasi, dan fasilitas yang perlu ditambah.</p> <p>2. Berdasarkan penelitian menggunakan analisis IPA diperoleh persepsi masyarakat tentang keberadaan PKL, alasan berbelanja di PKL, manfaat keberadaan PKL, gangguan dari keberadaan PKL, perlunya pengaturan terhadap PKL, dan fasilitas yang perlu ditambah.</p>	<p>Dalam penelitian, selain menggunakan variabel penelitian PKL dan persepsi, juga menggunakan variabel elemen perancangan kota untuk mengetahui karakteristik elemen perancangan kota. Selain itu, digunakan metode analisis kebutuhan ruang yang digunakan dalam aktivitas PKL maupun kebutuhan ruang elemen perancangan kota. Hasil dari penelitian tidak hanya berhenti sampai mengetahui karakteristik dan persepsi tetapi berlanjut sampai konsep penataan PKL.</p>

No	Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan	Variabel Penelitian	Metode Penelitian				Hasil	Perbedaan
					Deskriptif	Analisis IPA	Analisis Kebutuhan Ruang	Content Analysis		
2.	Srie Hany Ambarwati (2003)	Studi Aktivitas Pedagang Kaki Lima Dalam Pemanfaatan Ruang Di Kota Salatiga	Mengetahui perilaku PKL dalam memanfaatkan ruang kota yang berhubungan dengan aktivitas usahanya, persepsinya terhadap lokasi, dan persepsi masyarakat terhadap keberadaan aktivitas PKL.	1. Karakteristik aktivitas usaha PKL, yang terdiri dari: jenis dagangan, bentuk sarana perdagangan, lama waktu aktivitas, dan pola sebaran/pengelompokan PKL 2. Karakteristik lokasi aktivitas PKL, meliputi: lokasi aktivitas, status ruang aktivitas, jenis ruang yang dimanfaatkan, luas ruang yang digunakan, alasan pemilihan lokasi, dan perilaku dalam penggunaan tempat usaha di saat tidak beraktivitas. 3. Persepsi PKL terhadap	√	√	√	1. Berdasarkan penelitian didapatkan perilaku aktivitas usaha PKL didominasi oleh jenis dagangan PKL dengan bentuk sarana dagangan berupa warung tenda. 2. Berdasarkan penelitian didapatkan perilaku aktivitas usaha PKL dalam pemanfaatan ruang kota yang banyak memanfaatkan ruang umum seperti trotoar. 3. Berdasarkan analisis persepsi didapatkan bahwa lokasi PKL cenderung dekat dengan aktivitas masyarakat dan memiliki kemudahan pencapaian oleh sarana transportasi umum kota.	Dalam penelitian ini tidak sebatas menganalisis kebutuhan ruang untuk PKL tetapi juga kebutuhan ruang elemen perancangan kota. Variabel persepsi yang digunakan lebih diperdalam dengan menggunakan variabel dari karakteristik PKL dan elemen perancangan kota	

No	Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan	Variabel Penelitian	Metode Penelitian				Hasil	Perbedaan
					Deskriptif	Analisis IPA	Analisis Kebutuhan Ruang	Content Analysis		
3.	Danoe Iswanto (2007)	Tinjauan Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL), Aspek <i>Pedestrian Area</i> , dan Parkir di Kawasan Solo Grand Mall (SGM)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengetahui karakteristik <i>pedestrian area</i> di kawasan Solo Grand Mall dan kaitannya dengan elemen fisik perancangan kota</li> <li>Mengetahui karakteristik penataan parkir di kawasan Solo Grand Mall</li> <li>Mengidentifikasi kesiapan kecenderungan kegiatan PKL di</li> </ol>	<p>kedekatan dan kemudahan mencapai lokasi PKL</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Karakteristik <i>pedestrian area</i>: keamanan, lampu penerangan, bangku, tanaman peneduh, tempat sampah, kenyamanan secara estetis, dan kenyamanan secara psikologis.</li> <li>Penataan Parkir: jenis parkir, tata letak parkir.</li> <li>PKL: pola penyebaran PKL, lokasi, waktu, jenis dagangan, sarana dan prasarana,</li> </ol>	✓				Diketahui karakteristik <i>pedestrian area</i> , parkir dan pedagang kaki lima di kawasan Solo Grand Mall	Dalam penelitian ini variabel yang digunakan dikembangkan dalam analisis IPA dan kebutuhan ruang. Sehingga didapatkan persepsi terhadap kondisi <i>pedestrian area</i> , parkir, pedagang kaki lima dan kebutuhan ruangnya.

No	Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan	Variabel Penelitian	Metode Penelitian				Hasil	Perbedaan	
					Deskriptif	Analisis IPA	Analisis Kebutuhan Ruang	Content Analysis			
4.	Budi Sutrisno, Joko Suwandi, dan Sundari (2007)	Pola Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Surakarta berdasarkan Paduan Kepentingan PKL, Warga Masyarakat, dan Pemerintah Kota	Kawasan Solo Grand Mall	1. Mengetahui persepsi PKL, masyarakat, dan Pemerintah Kota terhadap penataan PKL. 2. Konsep pola penataan PKL yang mengakomodasi kepentingan masyarakat, dan Pemerintah Kota.	1. Persepsi PKL, masyarakat, pemerintah kota: aspek ekonomi, sosial, dan hukum 2. Lokasi PKL: keterkaitan usaha dengan lingkungan dan pembeli		√		√	1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan ditemukan konsep pola penataan PKL berdasarkan kepentingan PKL, masyarakat, dan pemerintah kota dari aspek ekonomi, sosial, dan hukum 2. Berdasarkan penelitian yang dilakukan ditemukan penataan PKL menurut keterkaitan dengan lingkungan dan pembeli	Dalam penelitian ini, konsep arahan penataan PKL tidak sebatas menggunakan hasil analisis IPA, tetapi dikombinasikan dengan kebutuhan ruangnya.



Gambar 2.24 Kerangka Teori

